

**PEMETAAN DIGITAL DAFTAR HIMPUNAN KETETAPAN PAJAK DAN PEMBAYARAN
(DHKP) DESA PAO PAO KECAMATAN TANETE RILAU**

***DIGITAL MAPPING OF THE TAX ASSESSMENT AND PAYMENT RECORDSN (DHKP)
OF PAO PAO VILLAGE, TANETE RILAU DISTRICT***

**Muh. Yusrim^{1*}, Putri Fatima Azzahrah², Muhammad Akmal³, Miftahullah Darwis⁴, Bahra
Muhammad Saleh⁵, Eka Sartika⁶, Raihan Akbari⁷, Aswar Erfin⁸, Dewi Anggaraini⁹**

^{1,2,3,.....9} Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Gowa, Indonesia

Email: muhyusrim8@gmail.com¹, putrifatimaazzahrah@gmail.com²,
muhammadakmal2003@gmail.com³, mhullah92@gmail.com⁴, bahramuhammad426@gmail.com⁵,
ekasartika466@gmail.com⁶, aimarsyehe@gmail.com⁷, aswar0845@gmail.com⁸,
dewi.anggariani@uin-alauddin.ac.id⁹

Abstrak: Pelaksanaan program kerja pemetaan digital daftar himpunan ketetapan pajak dan pembayaran (DHKP) dilakukan oleh Tim KKN Posko 6 Desa Pao-Pao, UIN Alauddin Makassar. Program Kerja ini bertujuan untuk melakukan pemetaan digital DHKP menggunakan WebDigDes guna mempermudah pengelolaan dan pemantauan data objek pajak. Metode yang digunakan meliputi digitalisasi dan pemetaan objek pajak kedalam WebDigDes. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa data DHKP berhasil didigitalisasi dan ditampilkan dalam bentuk peta digital sehingga memudahkan pencarian, pengelolaan, dan pembaruan data oleh pemerintah desa. Pemetaan digital ini mendukung pengelolaan administrasi perpajakan yang lebih efektif dan efisien.

Kata Kunci: Pemetaan digital, Digitalisasi, Pajak, DKHP, Kuliah Kerja Nyata.

Abstract: Implementation of a digital mapping work program for the list of tax stipulations and payments (DHKP) carried out by the KKN Team at Post 6 in Pao Pao Village, UIN Alauddin Makassar. This work program aims to digitally map the DHKP using WebDigDes to make it easier to manage and monitor tax object data. The method involves digitizing and mapping tax objects into WebDigDes. The results show that the DHKP data was successfully digitized and displayed in the form of a digital map, making it easier for village authorities to search, manage, and update the data. This digital mapping supports more effective and efficient tax administration management. Digital mapping, Digitization, Taxes, DKHP, Community Service Program.

Keywords: Digital mapping, Digitization, Taxes, DKHP, Community Service Program.

Article History:

Received	Revised	Published
24 Mei 2026	10 Juli 2026	15 Juli 2026

Pendahuluan

Kuliah Kerja Nyata (KKN) adalah wadah di mana mahasiswa dapat menerapkan ilmu-ilmu yang mereka pelajari di perguruan tinggi ke dalam kehidupan nyata. Sebagai wadah pengabdian masyarakat, KKN diharapkan dapat membantu mahasiswa meningkatkan kemampuan praktis mereka dalam menyerap keahlian yang ada di masyarakat. KKN diharapkan dapat membantu mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk menyelesaikan masalah yang ada di masyarakat (Lanniati et al., 2025).

Kuliah Kerja Nyata (KKN) diperlukan sebagai sarana bagi mahasiswa untuk menerapkan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan secara langsung di masyarakat. Melalui KKN, mahasiswa dapat meningkatkan kepedulian sosial, kemampuan bekerja sama, serta keterampilan dalam memecahkan masalah. Selain memberikan pengalaman belajar yang nyata, KKN juga menjadi bentuk pengabdian kepada masyarakat melalui berbagai program yang bermanfaat bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Salah satu program kerja unggulan yang dilaksanakan adalah Pemetaan Digital Daftar Himpunan Ketetapan Pajak dan Pembayaran (DHKP). Kegiatan ini dilakukan melalui situs resmi Desa Pao Pao yang dikenal sebagai Digital Desa (Digides), sebagai upaya untuk mendukung pengelolaan dan penyajian data perpajakan desa secara lebih efektif, terstruktur, dan mudah diakses. Web digital desa adalah platform berbasis internet yang dirancang untuk mengintegrasikan pelayanan publik, administrasi pemerintahan, dan informasi desa.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting untuk mendukung pembangunan dan pelayanan publik, seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Efektivitas pemungutan PBB sangat dipengaruhi oleh kualitas pengelolaan data pajak. Data yang akurat dan terbaru memudahkan identifikasi wajib pajak, penetapan pajak, serta pemantauan pembayaran. Karena itu, pengelolaan data DHKP secara terstruktur dan digital diperlukan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi dan optimalisasi penerimaan pajak daerah. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah kewajiban finansial yang dikenakan pada tanah dan bangunan, yang didasarkan pada keuntungan dan sosial ekonomi yang lebih tinggi bagi individu atau entitas yang memiliki hak atas aset tersebut atau mendapatkan keuntungan darinya. Dasar untuk penetapan pajak dalam PBB adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), yang ditentukan berdasarkan nilai pasar di setiap wilayah dan diumumkan setiap tahun oleh Menteri Keuangan (Mariana, 2023)

Daftar Himpunan Ketetapan Pajak dan Pembayaran (DHKP) merupakan dokumen yang memuat data wajib pajak, objek pajak, besaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terutang, serta status pembayarannya yang berfungsi sebagai dasar administrasi dan monitoring pajak. Pengelolaan DHKP yang baik sangat penting untuk meningkatkan efektivitas pemungutan pajak, akurasi data, dan optimalisasi penerimaan daerah. Untuk mendukung hal tersebut, dilakukan pemetaan digital DHKP secara online melalui website resmi Digital Desa (Digides), sehingga data pajak dapat tersimpan lebih terstruktur, mudah diakses, diperbarui, dan dipantau oleh aparat desa guna meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kualitas pelayanan perpajakan kepada masyarakat. Daftar Himpunan Ketetapan Pajak dan Pembayaran PBB merupakan berkas atau buku administrasi yang dipakai oleh pemerintah daerah, terutama dalam hal perpajakan. Beberapa kegunaan dari registrasi DHKP ini antara lain sebagai alat pemantauan penerimaan PBB, landasan untuk menilai kinerja pemungutan

pajak, serta berfungsi sebagai arsip data perpajakan yang resmi dan dapat digunakan dalam proses audit atau pemeriksaan (Ramadhani, 2025).

Pemetaan digital adalah proses pembuatan data dengan bentuk hasil digitasi atau gambar digital. Fungsi utamanya adalah untuk membuat peta yang mampu merepresentasi secara tepat dan akurat pada suatu kawasan amatan. Pengertian pemetaan digital adalah proses pengumpulan data yang berbentuk hasil digitalisasi atau citra digital. Tugas utamanya adalah menghasilkan peta yang dapat mencerminkan dengan tepat dan akurat suatu wilayah yang diamati. Peta digital pada awalnya memiliki peranan signifikan sama halnya dengan peta analog, memberikan ilustrasi tentang jalan umum yang dibentuk oleh kondisi fisik yang ada di sekitar area tersebut (Rahman et al., 2022).

Kegiatan pemetaan digital DHKP ini bertujuan untuk menghasilkan sistem informasi atau peta digital yang terintegrasi guna membantu Pemerintah Desa Pao Pao dalam mengelola data ketetapan dan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) secara lebih efektif, efisien, dan akurat. Berdasarkan kondisi tersebut, digitalisasi data Daftar Himpunan Ketetapan Pajak dan Pembayaran (DHKP) melalui pemetaan digital diperlukan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan administrasi perpajakan di Desa Pao Pao. Program ini diharapkan dapat mempermudah penyimpanan, pencarian, pembaruan, dan pemantauan data wajib pajak secara lebih cepat dan akurat, sehingga mendukung peningkatan kualitas pelayanan administrasi desa serta optimalisasi penerimaan pajak daerah. Pemerintah daerah memiliki kepentingan untuk merumuskan kebijakan yang akan menjadi peraturan daerah yang efektif dan efisien dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat (Rahmi et al., 2023)

Pengelolaan DHKP secara konvensional masih menghadapi berbagai kendala, seperti sulitnya pencarian data wajib pajak, risiko kehilangan atau kerusakan dokumen, serta lambatnya proses pembaruan data. Sistem konvensional juga belum mampu menyajikan informasi spasial mengenai sebaran objek pajak secara jelas, sehingga menyulitkan pemerintah desa dalam melakukan pengawasan dan pengambilan keputusan. Oleh karena itu, diperlukan digitalisasi DHKP untuk meningkatkan efisiensi, keamanan data, dan kemudahan akses informasi perpajakan. Dengan memanfaatkan teknologi tersebut, otoritas pajak dapat melakukan analisis data secara real-time untuk mendeteksi potensi penghindaran pajak serta meningkatkan akurasi dalam pengawasan. Namun, di sisi lain, tantangan serius muncul terkait dengan ancaman keamanan data dan privasi (Aristiyanto & Furqon, 2025).

Digitalisasi Desa dalam usaha untuk meningkatkan pembangunan desa yang lebih terfokus dan untuk memperbaiki mutu serta kualitas, terutama dalam pengelolaan pemerintahan desa, adalah program dari pemerintah pusat dengan slogan "membangun Indonesia dari desa". Proses digitalisasi menjadi elemen krusial sebagai langkah untuk mempercepat kemajuan desa (Lailiyah & Sri, 2022). Digitalisasi merupakan langkah untuk

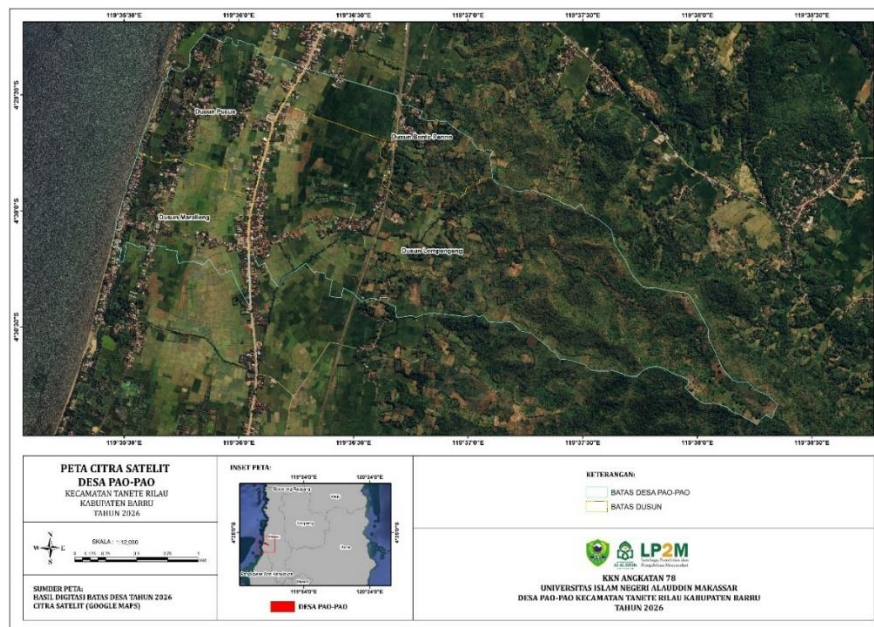
mengubah informasi atau data dari format fisik ke dalam format digital yang dapat diolah dengan teknologi informasi. Untuk meningkatkan mutu layanan publik, pemerintah harus memanfaatkan berbagai platform daring seperti situs web, aplikasi mobile dan jejaring sosial ((Irfan, 2023).

Salah satu manfaat dari program kerja Pemetaan Digital Desa (Digides) yang dilaksanakan oleh mahasiswa KKN adalah membantu Pemerintah Desa Pao-Pao, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, dalam meningkatkan pengelolaan data perpajakan desa. Melalui pemetaan digital DHKP, proses penyimpanan, pencarian dan pengelolaan data wajib pajak menjadi lebih mudah, cepat dan sistematis.

Metode

Lokasi pengabdian

Studi kasus berada di Desa Pao Pao salah satu desa dengan wilayah yang cukup luas, yaitu 9.300.000 m² yang mencakup kawasan pemukiman, wilayah agraris, serta kawasan pesisir. Desa ini dihuni oleh 4.496 jiwa dengan karakteristik masyarakat yang sebagian besar menggantungkan hidup pada sektor agraris dan kelautan. Wilayah Desa Pao-Pao memiliki pemanfaatan lahan yang dominan pada bidang pertanian dengan 241 hektare areal persawahan. Selain itu, terdapat 133,40 hektare lahan perkebunan yang menjadi salah satu penunjang ekonomi masyarakat.



Gambar 1. Peta Lokasi Penelitian

Batas administratif dari Desa Pao Pao Oleh :

- Sebelah Utara : Kelurahan Lalolang dan Desa Tellumpanua
- Sebelah Timur : Kecamatan Tanete Riaja
- Sebelah Selatan : Desa Corawali
- Sebelah Barat : Selat Makassar

Data dan Peralatan

Data yang dipakai pada penelitian kali ini meliputi yaitu:

1. Data non-spasial berupa salinan buku Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) Desa Pao pao Tahun 2004.
2. Untuk peralatan yang dipakai pada penelitian kali ini meliputi yaitu:
 - a. Perangkat Keras yaitu Laptop.
 - b. Perangkat Lunak yaitu pengolah kata dan perangkat lunak pemrosesan grafis berupa Website DIGDES (Digital Desa).

Tahapan Pengolahan Data

Metode yang digunakan dalam program ini meliputi observasi, digitalisasi data, dan penerapan sistem informasi berbasis web. Kegiatan diawali dengan observasi dan koordinasi bersama Pemerintah Desa Pao Pao untuk mengidentifikasi data DHKP yang belum dipetakan secara digital. Selanjutnya, data tersebut diintegrasikan ke dalam platform Digital Desa (Digides) sehingga menghasilkan sistem pengelolaan data perpajakan yang lebih efektif, efisien, dan akurat. Berikut uraian lebih detail mengenai metode yang diterapkan:

1. Tahap Persiapan
 - a. Melakukan koordinasi dengan pemerintah desa terkait pelaksanaan program kerja.
 - b. Menyiapkan perangkat seperti laptop dan pembuatan akun user di website resmi Digital Desa (DIGIDES) Desa Pao Pao yang digunakan dalam proses pemetaan.
 - c. Menyiapkan buku Daftar Himpunan Ketetapan Pajak dan Pembayaran (DHKP) yang menjadi acuan dalam pemetaan digital.
 - d. Melakukan pembelajaran mengenai pemetaan digital kemudian melakukan percobaan agar dapat memastikan sudah menguasai atau belum agar tidak terjadi kesalahan terhadap pengerjaan peta digital tersebut.
 - e. Mengidentifikasi kebutuhan dan tujuan pembuatan peta digital desa.
2. Tahap Pelaksanaan
 - a. Langkah awal dilakukan dengan membuka aplikasi Google Chrome, kemudian masuk ke sistem Digital Desa (DIGIDES) menggunakan akun pengguna yang telah

dibuat sebelumnya.

- b. Setelah berhasil masuk ke dalam sistem, pengguna memilih menu perpajakan dan melanjutkan proses digitasi batas setiap bidang tanah yang memiliki objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Desa Pao Pao. Kegiatan ini dilakukan dengan berpedoman pada data dalam Buku Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) Desa Pao Pao Tahun 2004 yang diperoleh dari instansi pertanahan Kabupaten Barru.
 - c. Setelah seluruh proses digitasi selesai dilakukan dengan tepat, data yang telah dibuat kemudian dikirim (submit) ke dalam sistem agar dapat diakses oleh aparat desa. Selanjutnya, hasil digitasi tersebut dievaluasi untuk memastikan kesesuaiannya dengan kondisi dan data yang diharapkan.
3. Tahap Monitoring dan Evaluasi
- a. Melakukan pengecekan kembali hasil digitasi yang telah diinput.
 - b. Memferifikasi kesesuaian hasil digitasi dengan buku Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) Desa Pao pao Tahun 2004.
 - c. Memperbaiki hasil digitasi yang tidak sesuai atau yang belum lengkap
 - d. Melakukan pengecekan dan validasi hasil pemetaan bersama perangkat desa

Hasil dan Pembahasan

Kegiatan pemetaan digital daftar himpunan ketetapan pajak dan pembayaran dilaksanakan oleh mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan 78 Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar di Desa Pao Pao, Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru. Program ini bertujuan untuk membantu pemerintah desa dalam meningkatkan pelayanan perpajakan didesa. Melalui digitalisasi data dan pemetaan objek pajak, diharapkan pemerintah desa dapat lebih mudah mengakses, memperbarui, serta memantau informasi perpajakan secara cepat, akurat, dan terintegrasi sehingga dapat mendukung pelayanan administrasi dan pengambilan keputusan yang lebih baik.

Desa Pao Pao, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru telah memiliki sistem Website Digital Desa (DIGIDES) yang berfungsi sebagai sarana pengelolaan dan penyimpanan berbagai data administrasi desa secara digital. Salah satu pemanfaatan utama dari sistem tersebut adalah untuk menyimpan dan mengelola data Daftar Himpunan Ketetapan Pajak dan Pembayaran (DHKP) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Data DHKP dapat diintegrasikan ke dalam sistem melalui proses digitalisasi dan digitasi peta, sehingga informasi perpajakan dapat ditampilkan dalam bentuk spasial atau peta digital yang lebih mudah dipahami dan diakses. Selain itu, visualisasi data dalam bentuk peta memungkinkan identifikasi lokasi objek pajak secara lebih akurat, sehingga membantu proses pendataan,

penagihan dan evaluasi penerimaan pajak desa. Sistem ini juga mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan desa yang lebih modern, transparan dan efisien dalam pengelolaan informasi perpajakan (Meidodga et al., 2023) dengan demikian, kegiatan pemetaan yang dilakukan di Desa Pao Pao memperkuat hasil penelitian sebelumnya bahwa Data spasial yang dapat diintegrasikan meliputi peta pendaftaran dari Kantor Pertanahan, peta blok rencana dari Dinas Tata Ruang.



Gambar 2 dan 3. Kegiatan Proses Digitasi Peetaan Digital

Melalui proses pemetaan digital, berbagai informasi mengenai kondisi dan karakteristik suatu wilayah dapat terdokumentasi dengan baik serta disajikan dalam bentuk yang mudah diakses dan diperbarui. Hasil pemetaan digital tidak hanya berupa peta, tetapi juga basis data geospasial yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung perencanaan pembangunan, pengelolaan sumber daya, pelayanan publik, serta pengambilan keputusan berbasis data. Dengan demikian, pemetaan digital menjadi salah satu teknologi penting yang berperan dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan wilayah dan mendukung pembangunan yang lebih terarah, berkelanjutan, dan berbasis informasi yang akurat. Untuk lebih jelasnya hasil digitasi data Daftar Himpunan Ketetapan Pajak dan Pembayaran (DHKP) dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Gambar 4. Hasil Digitasi Daftar Himpunan Ketetapan Pajak dan Pembayaran(DHKP)

Berdasarkan gambar 3 tersebut, dapat dilihat hasil pemetaan yang telah dilaksanakan oleh mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) UIN Alauddin Makassar Angkatan 78 di Desa Pao Pao melalui platform Web Digital Desa (DIGIDES). Kegiatan pemetaan difokuskan pada dua blok wilayah, yaitu Blok 9 dan Blok 10. Pada peta tersebut, bidang-bidang tanah hasil digitasi ditampilkan dengan warna merah, sedangkan area yang dibatasi oleh garis berwarna biru menunjukkan cakupan wilayah pemetaan yang dikerjakan oleh mahasiswa KKN UIN Alauddin Makassar Angkatan 78. Sementara itu, wilayah yang berada di luar batas garis biru merupakan hasil pemetaan yang telah dilakukan oleh mahasiswa KKN pada periode sebelumnya.

Hasil pemetaan ini menunjukkan adanya upaya pembaruan dan penyempurnaan data spasial desa yang dilakukan secara berkelanjutan guna meningkatkan kualitas informasi pertanahan dan perpajakan di tingkat desa. Melalui proses digitasi per bidang, setiap objek pajak atau bidang tanah dapat diidentifikasi secara lebih jelas, akurat, dan terstruktur berdasarkan batas-batas bidang yang telah ditetapkan. Proses ini memungkinkan setiap bidang tanah memiliki informasi yang lebih lengkap, seperti identitas pemilik, luas bidang, nomor objek pajak (NOP), serta data pendukung lainnya yang saling terintegrasi dalam satu sistem. Dengan demikian, pemerintah desa dapat lebih mudah melakukan pendataan, pembaruan data, serta pengelolaan administrasi pertanahan dan perpajakan secara efektif dan efisien.

Pemetaan digital yang dilakukan melalui aplikasi DIGIDES juga memberikan kemudahan dalam proses penyimpanan, pencarian, dan pengelolaan data karena seluruh

informasi telah tersusun secara sistematis dalam format digital. Data yang sebelumnya masih berupa dokumen fisik atau peta manual dapat diakses dengan lebih cepat tanpa memerlukan pencarian secara manual yang memakan waktu. Sistem digital ini juga memudahkan proses pembaruan data apabila terjadi perubahan kepemilikan, pemecahan bidang, penggabungan bidang, maupun perubahan data objek pajak lainnya.

Keberadaan data spasial yang terintegrasi juga memberikan manfaat bagi pemerintah Desa Pao Pao dalam mendukung proses perencanaan pembangunan, pengambilan keputusan, serta pemantauan perkembangan wilayah desa. Dengan adanya pembagian wilayah kerja antara hasil pemetaan KKN Angkatan 78 dan pemetaan sebelumnya, dapat terlihat kesinambungan program digitalisasi desa yang bertujuan untuk menghasilkan basis data yang lengkap, akurat, dan mudah diakses. Oleh karena itu, kegiatan pemetaan ini tidak hanya berfungsi sebagai dokumentasi wilayah, tetapi juga menjadi langkah strategis dalam mendukung tata kelola pemerintahan desa yang lebih efektif, efisien, dan berbasis teknologi informasi.

Selain menghasilkan peta digital, program kerja ini juga memberikan manfaat berupa tersusunnya basis data geospasial yang dapat diperbarui secara berkala sesuai perkembangan kondisi wilayah. Basis data tersebut memudahkan proses pemantauan perubahan wilayah, seperti perkembangan permukiman, perubahan penggunaan lahan, maupun pembangunan infrastruktur baru. Dengan adanya data yang terdigitalisasi, proses pencarian, pengolahan, dan penyajian informasi menjadi lebih cepat dan efisien dibandingkan dengan penggunaan peta konvensional.

Tabel 1. Hasil Evaluasi Kegiatan Pemetaan Digdes

No	Aspek yang di evaluasi	Kondisi sebelum program	Kondisi Setelah Program	Hasil Evaluasi
1.	Informasi Lokasi Objek Pajak	Lokasi objek pajak belum terpetakan secara digital	Lokasi objek pajak dapat ditampilkan pada peta digita	Memudahkan identifikasi objek pajak
2.	Monitoring Data Pajak	Dilakukan secara manual	Data dapat dipantau melalui sistem digital	Monitoring menjadi lebih efektif

3.	Akurasi Data	Terdapat beberapa data yang belum terorganisir dengan baik	Data telah diverifikasi dan diperbarui dalam sistem	Kualitas data menjadi lebih baik
----	--------------	--	---	----------------------------------

Berdasarkan tabel evaluasi hasil penelitian, pelaksanaan program Pemetaan Digital Daftar Himpunan Ketetapan Pajak dan Pembayaran (DHKP) menggunakan WebDigDesa sangat membantu dalam pengelolaan data perpajakan desa. Sebelum program dilaksanakan, data DHKP masih disimpan dalam bentuk arsip fisik sehingga proses pencarian dan pengelolaan data memerlukan waktu yang cukup lama. Setelah dilakukan digitalisasi melalui WebDigDes, data dapat disimpan secara elektronik sehingga lebih rapi, aman dan mudah diakses. Hal ini sesuai dengan pendapat (Suryani et al., 2025) yang menyatakan bahwa Pemetaan objek pajak reklame memungkinkan petugas lapangan untuk melakukan verifikasi dengan cepat dan memastikan data dapat dimonitor secara langsung. Hal ini mempercepat proses pemutakhiran database objek pajak, mengurangi kesalahan dalam penginputan, serta memungkinkan pemantauan secara real-time. Selain itu, penguatan infrastruktur digital sangat penting agar proses pengumpulan, penyimpanan, dan analisis data pajak dapat dilakukan secara real-time dan terintegrasi lintas bidang.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa metode pemetaan cukup membantu dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan data perpajakan di desa. Melalui digitalisasi data dan pemetaan objek pajak, diharapkan pemerintah desa dapat lebih mudah mengakses, memperbarui, serta memantau informasi perpajakan secara cepat, akurat dan terintegrasi sehingga dapat mendukung pelayanan administrasi dan pengambilan keputusan yang lebih baik. Program ini juga berkontribusi dalam meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi di lingkungan pemerintahan desa. Aparatur desa memperoleh pengalaman dalam menggunakan sistem digital untuk mendukung pekerjaan administrasi, sehingga kapasitas dan keterampilan mereka dalam pengelolaan data menjadi lebih baik. Selain itu, proses verifikasi dan pembaruan data yang dilakukan selama kegiatan membantu meningkatkan akurasi dan kualitas data DHKP yang dimiliki desa.

Program ini juga berkontribusi dalam meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi di lingkungan pemerintahan desa. Aparatur desa memperoleh pengalaman dalam menggunakan sistem digital untuk mendukung pekerjaan administrasi, sehingga kapasitas dan keterampilan mereka dalam pengelolaan data menjadi lebih baik. Selain itu, proses verifikasi dan pembaruan data yang dilakukan selama kegiatan membantu meningkatkan akurasi dan kualitas data DHKP yang dimiliki desa.

Kesimpulan

Kegiatan Pemetaan Digital Daftar Himpunan Ketetapan Pajak dan Pembayaran (DHKP) yang dilaksanakan oleh mahasiswa KKN (Kuliah Kerja Nyata) Angkatan 78 UIN Alauddin Makassar di Desa Pao Pao Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru dapat disimpulkan bahwa program kerja ini berhasil mendigitalisasikan data DHKP serta Digitalisasi yang dilakukan mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan data perpajakan dibandingkan dengan sistem manual yang sebelumnya digunakan.

Penggunaan WebDigDes memberikan kemudahan bagi pemerintah desa dalam menyimpan, mencari, memperbarui dan memantau data objek pajak secara lebih cepat dan terstruktur. Selain itu, visualisasi objek pajak dalam bentuk peta digital membantu perangkat desa dalam mengetahui persebaran objek pajak serta mendukung proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan administrasi dan pembangunan desa.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan dan kerja sama dalam pelaksanaan program Pemetaan Digital Daftar Himpunan Ketetapan Pajak dan Pembayaran (DHKP) menggunakan WebDigDes di Desa Pao Pao. Ucapan terima kasih disampaikan kepada Kepala Desa beserta seluruh perangkat Desa Pao Pao yang telah memberikan izin, data, serta pendampingan selama kegiatan berlangsung. Terima kasih juga kepada dosen pembimbing yang telah memberikan arahan dan masukan sehingga program dapat terlaksana dengan baik. Selain itu, penulis menyampaikan apresiasi kepada masyarakat Desa Garessi yang telah berpartisipasi dan mendukung pelaksanaan kegiatan ini. Semoga hasil kegiatan ini dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi pemerintah dan masyarakat Desa.

Referensi

- Aristiyanto, R., & Furqon, I. K. (2025). Tantangan dan Solusi Dalam Mewujudkan Sistem Perpajakan Modern dan Transparan di Era Digital. *Jurnal Economina*. 4, 340–347.
- Irfan, B. (2023). Pelayanan publik era digital: Studi literatur. *Indonesian Journal of Intellectual Publication*. 4(1), 23–31.
- Lanniati, M., Maulidya, N. K., Sari, A. W. F., Khasanah, U., Salsabila, F. N., Zahrani, S. M., ... & Azzahro. (2025). Pengabdian Kepada Masyarakat Melalui Kuliah Kerja Nyata (KKN) di MTs Yayasan Al-Barkah–Curug . *Economic Reviews Journal*. 4, 553–561. <https://doi.org/10.56709/mrj.v4i2.690>
- Lailiyah, K., & Sri, U. S. (2022). *RISTEK: Jurnal Riset , Inovasi dan Teknologi Kabupaten Batang*. 6(2), 26–34.
- Mariana. (2023). Pembayaran Pajak Bumi dan Bagunan; Kasus Kabupaten Pidie. *Jurnal HEI EMA*. 2(2), 108–115.

- Meidodga, I. S., Syahrin, A., Putra, R. T., Warfandu, F., & Nugroho, A. (2023). Pemanfaatan Data Geospasial Dalam Mewujudkan Sistem Informasi Pertanahan Multiguna Bagi Multipihak. *Jurnal widya bhumi*. 62–80.
- Rahman, B., Spasial, D., & Desa, D. (2022). Analisis manfaat data digital spasial bagi desa. *Jurnal Pondasi*. 27(1), 88–97.
- Rahmi, N. S., Wayan, N., Wardhani, S., Fernandes, A. A. R., & Brawijaya, U. (2023). Peningkatan Kualitas Pelaporan DHKP (Daftar Himpunan Ketetapan Pajak dan Pembayaran) Desa Kedungsolo Porong Sidoarjo Tahun 2022. *Jurnal of Innovation and Applied Tecnology*. 12, 12–19.
- Ramdhani, M. N (2025). Sosialisasi Sistem Pengelolaan Pajak Bumi Dan Bangunan Dalam Meningkatkan Efisiensi Dan Akurasi Data Wajib Pajak (Doctoral dissertation, Universitas Tadulako).
- Suryani, A. D., Huda, S., Timur, J., Reklame, P., Daerah, P., & Daerah, P. A. (2025). Kontribusi Validasi Data Objek Pajak dan Pendataan Potensi Reklame terhadap Peningkatan PAD. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*. 5, 767–778.